

2018

LAPORAN KINERJA

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



SAMBUTAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Terciptanya *good governance* dan *clean government* mendapatkan tempat yang sangat strategis dan berimplikasi pada seluruh unit dan warga organisasi termasuk Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam rangka turut serta menciptakan *good governance* dan *clean government* di lingkungan BPOM tersebut, Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2018 ini disusun. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada organisasi, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Sebagai unit yang mengkoordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan berupaya meletakkan dasar-dasar dan melaksanakan proses tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh suprasistem.

Perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir akan memudahkan proses pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan evaluasinya sebagai suatu mata rantai yang saling terkait. Transparansi dan akuntabilitas merupakan titik tolak dan fokus terciptanya *good governance* dan *clean government*. Karena itu, selain mengkoordinasi dan memfasilitasi proses perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan yang memuat aturan-aturan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Pengendalian kegiatan diperlukan untuk menjamin bahwa target yang ditetapkan akan dapat dicapai dan masalah yang ditemui dapat diidentifikasi dan diselesaikan sedini mungkin. Selain itu, pengendalian terutama di tahap perencanaan bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan menjamin bahwa dana yang dialokasikan memberikan kontribusi

signifikan pada pencapaian kinerja organisasi. Lebih lanjut, pengendalian dapat digunakan sebagai *feedback* untuk perencanaan berikutnya.

Kemampuan manajemen tidak kalah pentingnya dengan kemampuan teknis terutama untuk menerjemahkan kebijakan dan arahan pimpinan agar menjadi program dan kegiatan prioritas. Untuk meningkatkan kapasitas SDM BPOM dalam bidang manajemen program dan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan secara terus menerus dan berkesinambungan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk peningkatan kapasitas SDM bidang manajemen. SDM yang berkualitas diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan program sehingga sasaran dan tujuan organisasi tercapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Biro Perencanaan dan Keuangan serta dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan kinerja BPOM dari tahun ke tahun.

Jakarta, 8 Februari 2019

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman.
SAMBUTAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	7
C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	12
B. PERJANJIAN KINERJA 2018	25
C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. REALISASI ANGGARAN	56
C. ANALISI EFISIENSI ANGGARAN	59
BAB IV PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Isu Strategis	5
Tabel 2	Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan	10
Tabel 3	Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan.....	10
Tabel 4	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)	23
Tabel 5	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru).....	24
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan (OTK Lama).....	26
Tabel 7	Target dan Realisasi Sasaran ke 1 : Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	34
Tabel 8	Target dan Realisasi Sasaran ke 2: Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja. 36	
Tabel 9	Target dan Realisasi Sasaran ke 3 : Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	39
Tabel 10	Target dan Realisasi Sasaran ke 4 : Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM.....	40
Tabel 11	Target dan Realisasi Sasaran ke 5 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	42
Tabel 12	Target dan Realisasi Sasaran ke 6 : Peresentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	45
Tabel 13	Target dan Realisasi Sasaran ke 7 : Persentase Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja Yang Diselesaikan Tepat Waktu	47
Tabel 14	Target dan Realisasi Sasaran ke 8 : Persentase Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	49
Tabel 15	Target dan Realisasi Sasaran ke 9 : Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	51
Tabel 16	Perbandingan Realisasi Tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 terhadap Target Rencana Strategis 2019.....	52
Tabel 17	Realisasi Anggaran OTK Lama	56
Tabel 18	Realisasi Anggaran OTK Baru	57
Tabel 19	Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan.....	8
Gambar 2 Peta Strategi BSC Level 0 BPOM	16
Gambar 3 Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama	16
Gambar 4 Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan	17
Gambar 5 Visi, Misi, dan Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan	23
Gambar 6 Indikator Kinerja Utama.....	25
Gambar 7 Perbandingan Realisasi Anggaran 2016 s.d. 2018	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja tingkat eselon II wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media evaluasi untuk melihat efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan yang bermuara pada pencapaian visi dan misi BPOM. Dari hasil evaluasi dapat dilihat prioritas kegiatan yang harus diutamakan dalam perencanaan-perencanaan selanjutnya, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dan sumber dana dibandingkan dengan tuntutan lingkungan strategis yang semakin berkembang.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan perwujudan akuntabilitas Biro Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini memuat capaian kinerja selama tahun 2018 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2018. Biro Perencanaan dan Keuangan telah mengukur capaian kinerja sasaran kegiatan sesuai Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 Nomor HK.04.03.21.08.18.1818. Revisi Rencana Strategis tersebut didasarkan pada diterbitkannya Perka BPOM Nomor 26 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, dengan terbitnya peraturan tersebut salah satu sub bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan bergabung ke Biro Hukum dan Organisasi.

Untuk mewujudkan visi dan misi BPOM, Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit pendukung, sesuai tugas dan fungsi pada OTK Baru mempunyai 9 Sasaran Kegiatan, yaitu : (1) Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019; (2) Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP; (3) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan; (4) Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM, (5) Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran; (6) Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas; (7) Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu; (8) Tersedianya dokumen

penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu; (9) Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 9 Indikator dengan capaian IKU sebagai berikut :

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas, dengan capaian 99,78%
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM, dengan capaian 95,50%.
3. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan capaian 131,67%.
4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM , dengan capaian 100%.
5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dengan capaian 126,17%.
6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas, dengan capaian 95,31%.
7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian 100%.
8. Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dengan capaian 100%
9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, 94,08%.

Dari kesembilan indikator diatas, target tercapai 3 indikator dengan kriteria baik, 4 indikator berkriteria cukup dan 2 indikator kriteria tidak dapat disimpulkan.

Pada tahun 2018 sesuai DIPA OTK lama Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai anggaran senilai Rp.41.149.800.000,00. Nilai anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada RENJA BPOM OTK Baru senilai Rp37.148.500.000,00. DIPA Revisi OTK baru yang terbit tanggal 20 Juli 2018 anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan senilai Rp38.478.810.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.378.395.159,00 (89,34%). Perbedaan anggaran antara RENJA OTK Baru dan DIPA OTK Baru karena terdapat anggaran dari sub bagian Organisasi dan Tata Laksana yang sudah ada realisasi sebelum terbit nya DIPA OTK baru yaitu senilai Rp1.330.310.000,00.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2018 untuk selanjutnya dapat memberi masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Perubahan Organisasi

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KB POM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Biro Perencanaan dan Keuangan adalah “melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan”.

Fungsi yang diselenggarakan untuk melaksanakan tugas tersebut yaitu :

- a. Pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
- c. Pelaksanaan manajemen keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu : Bagian Rencana Strategis dan Organisasi, Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan, dan Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Pada tahun 2017 diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merestrukturisasi organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan presiden diatas BPOM menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun

2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pengganti Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan organisasi dan tata kerja BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit eselon II dibawah Sekretariat Utama yang mempunyai tugas :

melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. Penyiapan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- d. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

3. Aspek Strategis

BPOM sesuai Perubahan OTK baru mempunyai 6 (enam) eselon I yang terdiri dari 4 (empat) eselon di bidang teknis yaitu Deputi I Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi III Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi IV Bidang Penindakan, 1 (satu) eselon I pendukung manajemen pelaksana teknis yaitu Sekretariat Utama dan 1 (satu)

eselon I yang berfungsi menyelenggarakan pengawasan internal BPOM yaitu Inspektorat Utama.

Berdasarkan Undang-undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, salah satu tahapan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga sesuai dengan fokus prioritas RPJMN.

Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan Rencana Strategis BPOM, Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan Eselon II (pusat dan daerah) dan memastikan Rencana Strategis yang disusun telah sesuai dengan :

- a. Pedoman dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Pengawas Pembangunan Nasional (Bappenas)) serta setiap kebijakan strategis BPOM tertuang didalamnya.
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
- c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian.

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis perlu dilaksanakan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja yang mendukung sasaran strategis tersebut.

Dalam melakukan kegiatan harus didukung anggaran yang terlebih dahulu disusun Rencana Kerja Pemerintah, RENJA setiap Unit Kerja dan DIPA. Biro Perencanaan dan Keuangan mengawal proses perencanaan kegiatan tersebut dan memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja berjalan sesuai ketentuan. Biro Perencanaan dan Keuangan memonitor secara berkala pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RKP dan DIPA serta

pelaporan capaian tersebut ke dalam sistem monev secara on line dan laporan kinerja BPOM.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dikelola. Laporan ini untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan.

Terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini menjadi dasar bagi BPOM baik unit kerja Eselon I, unit kerja eselon II dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk melaksanakan SAKIP.

Pada setiap akhir semester 1 dan akhir tahun anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan organisasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sebagai bentuk tanggung jawab akuntabilitas pelaksanaan tupoksi dan penggunaan anggaran, Biro Perencanaan dan Keuangan mengkoordinir penyusunan laporan kinerja BPOM. Laporan Kinerja merupakan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang perlu ditingkatkan agar nilai BPOM maksimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut, setiap tahun Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan Bimbingan Teknis SAKIP dengan mengundang wakil dari setiap unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan adanya Bimbingan Teknis SAKIP, diharapkan terjadi persamaan persepsi semua unit kerja pusat dan daerah terkait pelaksanaan, perhitungan dan pelaporan kinerja, yang dapat berdampak pada peningkatan nilai SAKIP BPOM.

4. Isu Strategis

Pada Tahun 2018, dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai isu strategis sebagai berikut :

Tabel 1
Isu Strategis

Bagian	Isu Strategis	Tindak Lanjut
Perencanaan	1 Menyusun indikator sasaran strategis indeks pengawasan Obat dan Makanan yang menggambarkan data pengawasan Obat dan Makanan secara spasial	Tersusunnya indikator sasaran strategis indeks pengawasan Obat dan Makanan yang menggambarkan data pengawasan Obat dan Makanan secara spasial
	2 Perubahan Rencana Strategis BPOM 2015-2019 dikarenakan perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM	Tersusunnya dokumen Perubahan Rencana Strategis BPOM 2015-2019
	3 Reviu kesesuaian dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Strategis BPOM dan Rencana Strategis Unit Kerja	Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan dengan Rencana Strategis BPOM dan Rencana Strategis Unit Kerja
Penganggaran	1 Penyusunan RKA-K/L unit Pusat dan UPT: a. penelitian RKA-K/L belum dilaksanakan secara optimal sehingga masih terdapat beberapa akun yang tidak tepat penempatannya b. penyampaian TOR, RAB, dan data dukung lainnya tidak tepat waktu	Pengembangan aplikasi e-budgeting.
	2 Frekuensi revisi DIP/POK melebihi target yang ditetapkan. Kondisi ini menjadi salah satu indikator perencanaan program dan kegiatan yang belum optimal.	Frekuensi revisi DIP/POK menjadi salah satu parameter penilaian kinerja kepala unit kerja
	3 Realisasi anggaran untuk pembangunan/renovasi gedung di beberapa Balai Besar / Balai POM kurang optimal.	Ditetapkan pedoman pemantauan dan pelaporan pembangunan gedung/renovasi

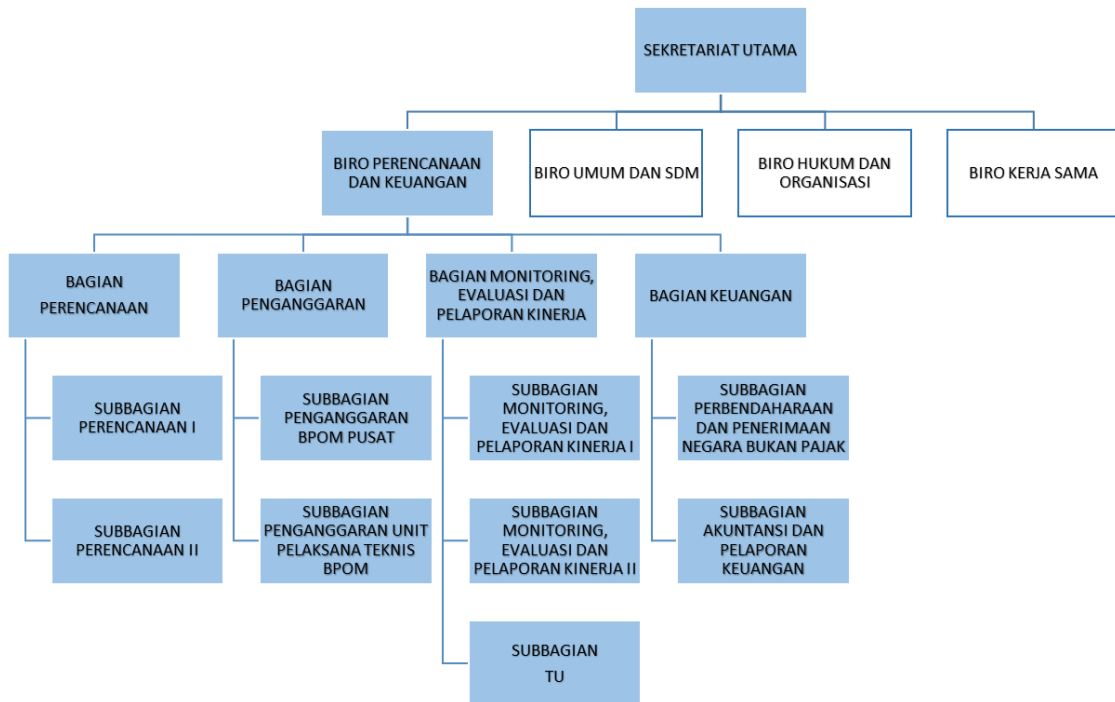
Bagian	Isu Strategis	Tindak Lanjut
	4 Pengalokasian belanja operasional (pemeliharaan, honor pramubakti, operasional kantor, dll) per Satker kurang tepat, sehingga terdapat beberapa Satker yang realisasi belanja operasionalnya rendah, sedangkan terdapat satker lain yang kekurangan belanja barang operasional	Dilakukan pertemuan di awal tahun untuk membahas kebutuhan belanja operasional per Satker berdasarkan data realisasi
	5 Tidak terdapat korelasi antara realisasi anggaran dan realisasi fisik	Unit kerja agar menetapkan komponen kegiatan yang menggambarkan tahapan untuk pencapaian target fisik
	6 Pengalokasian anggaran belum berdasarkan hasil revidi terhadap kegiatan dan komponen anggaran	Diterapkan mekanisme reward dan punishment pada saat pengalokasian anggaran tahun n+1 berdasarkan kinerja tahun n-1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	1 Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM : a. Masih banyak Peta strategi Eselon I sampai II yang belum final. b. Indikator kinerja Eselon III dan IV belum final terutama di Kedeputian. c. BB/Balai dan Unit Kerja di Kedeputian kesulitan menentukan DO dan target. d. Berdasarkan rekomendasi MenpanRB pada saat <i>exit meeting</i> audit RB, bahwa sasaran dan indikator di <i>cascading</i> dari level 0 s.d 4, akan tetapi beberapa Unit Kerja untuk perspektif stakeholder dan customer level 2 tidak diturunkan ke level 3 dan 4 karena exercise dilakukan sebelum <i>exit meeting</i> .	Membuat surat edaran permintaan peta strategi, target, dan DO yang sudah final.
	2 Pengembangan aplikasi e- <i>Performance</i> sesuai OTK baru menggunakan metode	Aplikasi sudah terintegrasi dengan e-SKP secara <i>realtime</i> Sudah dilakukan integrasi realisasi anggaran (SAS)

Bagian	Isu Strategis	Tindak Lanjut
	<i>Balanced Scorecard</i> dengan 4 perspektif	Sosialisasi dan Bimtek <i>e-Performance</i> yang dihadiri oleh seluruh Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM
Keuangan	1 Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh DJPB, Kemkeu terhadap Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM masih terdapat beberapa indikator di bawah rata-rata nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Dit SITP dan Dit. Pelaksanaan Anggaran, DJPB, Kemkeu terkait pertukaran data Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 2. Menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Membuat Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker di lingkungan BPOM setiap Triwulan
	2 Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan agar tetap memperoleh opini WTP dari BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review Perka BPOM no. 12 tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi BPOM 2. Revisi Pedoman Pengelolaan PNPB disesuaikan dengan OTK baru dan Kebijakan Akuntansi BPOM

B. STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebelum perubahan Organisasi dan Tata Kerja terdiri dari Bagian Rencana Strategis dan Organisasi, Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan, Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja. Pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang baru, Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana bergabung dengan Biro Hukum dan Organisasi, fungsi pelaksanaan penyusunan program jangka pendek dan jangka menengah yang ada di Bagian Program dan Anggaran pada Organisasi dan Tata Kerja (OTK) lama menjadi fungsi di Bagian Perencanaan pada OTK baru. Terdapat juga perubahan Nomenklatur nama Bagian dan Sub Bagian.

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Struktur Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi :



Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 4 (empat) Bagian yaitu :

1. Bagian Perencanaan
 2. Bagian Penganggaran
 3. Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
 4. Bagian Keuangan
1. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan penyusunan rencana strategis dan rencana tahunan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; dan
 - b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan analisis dan penyerasian rencana tahunan atau jangka pendek.

2. Bagian Penganggaran, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, Bagian Penganggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan dan analisis pinjaman dan hibah luar negeri.
3. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM; dan
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
4. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan BPOM. Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM;
 - c. penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem akuntansi BPOM; dan
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai, dengan profil pegawai berdasarkan tingkat kepangkatan/Golongan seperti pada **Tabel 2**.

Tabel 2
Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan Berdasarkan Golongan

No	Nama Bagian	Golongan			
		II	III	IV	Total
1	Kepala Biro			1	1
2	Bagian Perencanaan		5	2	7
3	Bagian Penganggaran	1	8	2	11
4	Bagian Monev dan Lapkin		6	2	8
5	Bagian Keuangan	2	7	2	11
Grand Total		3	26	9	38

Dari **tabel 2** dapat diketahui bahwa pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 26 orang (70%).

Tabel 3
Profil Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan

No	Nama Bagian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SMA	D3	S1	S1 Apt	S2	S3	
1	Kepala Biro						1	1
2	Bagian Perencanaan			3	1	3		7
3	Bagian Penganggaran	2	1	4	3	1		11
4	Bagian Monev dan Lapkin	1	1	3	2	1		8
5	Bagian Keuangan	2	2	4		3		11
		5	4	14	6	8	1	38

Biro Perencanaan dan Keuangan selain memiliki ASN juga memiliki 27 orang tenaga pramubakti.

2. Sarana dan Prasarana

Biro Perencanaan dan Keuangan telah didukung dengan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas antara lain :

- 1) Ruang kerja yang terdiri atas Ruang Kepala Biro, Ruang Kepala Bagian dan Ruang, Kepala Subbagian serta ruang kerja staf.
- 2) Perangkat dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan aktivitas.
- 3) Peralatan dan meubelair dan kelengkapan lain untuk melaksanakan tugas.
- 4) Ruang rapat dan ruang arsip

3. Anggaran

Anggaran yang dipertanggungjawabkan pada tahun 2018 sebesar Rp41.149.800,00. Namun pada tahun berjalan terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana Subbagian Organisasi dan Tata Laksana bergabung ke Biro Hukum dan Organisasi sehingga terjadi penyesuaian anggaran senilai Rp38.478.810,00,00. Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2018 menurut aplikasi OMSPAN sebesar Rp34.378.955.159,00 (89,35%).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Perencanaan kinerja jangka waktu lima tahun pada periode RPJMN ke-3 telah dituangkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Rencana strategis (Rencana Strategis) merupakan upaya sistematis dan berkesinambungan yang diarahkan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi melalui pencapaian sasaran strategis dalam rangka mengemban mandat yang diberikan pemerintah, dengan memperhatikan tantangan, peluang, potensi, dan kelemahan yang dihadapi dari lingkungan strategisnya. Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 dengan Keputusan kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor 01.02.211.05.15.1089 Tahun 2015 yang disusun mengacu pada Rencana Strategis BPOM 2015-2019 dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan, Program Kerja dan Indikator Kinerja, sesuai tugas pokok dan fungsi.

REVISI RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019

Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 mengacu kepada Organisasi dan Tata Kerja baru yang merupakan amanat tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Rencana Strategis K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang: (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis K/L; atau (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi K/L.

Revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor HK.04.03.21.08.18.1818 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015-2019.

A.1 Visi

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang memiliki tugas dan fungsi di dalam melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan, perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan serta sasarannya sesuai dengan tugas dan fungsi. Mengingat Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi BPOM, maka visi Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan dicapai sesuai Rencana Strategi periode 2015-2019 adalah sama dengan visi BPOM yaitu.

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Dengan visi tersebut, diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target Rencana Strategis BPOM 2015-2019.

A.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Biro Perencanaan dan keuangan adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Biro Perencanaan dan Keuangan. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang sesuai dengan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

1

Meningkatkan Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan Berbasis Risiko untuk Melindungi Masyarakat

2

Mendorong Kapasitas Dan Komitmen Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan Obat dan Makanan Serta Memperkuat Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

3

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan BPOM

A.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi berdasarkan potensi dan permasalahan di Biro Perencanaan dan Keuangan, ditetapkan tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2015-2019 adalah:

Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel

Uraian tujuan:

1. Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit pendukung berperan memperlancar proses pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.
2. Efektif adalah output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan dapat menysasar pada fungsi/tujuan.

3. Efisien adalah penggunaan sumber daya yang paling optimal, penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan/kinerja yang diberikan.
4. Akuntabel merupakan kriteria pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dengan menggunakan anggaran pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM di Bidang Akuntabilitas serta meningkatnya nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.

Tujuan dan indikator Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan :

Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan:

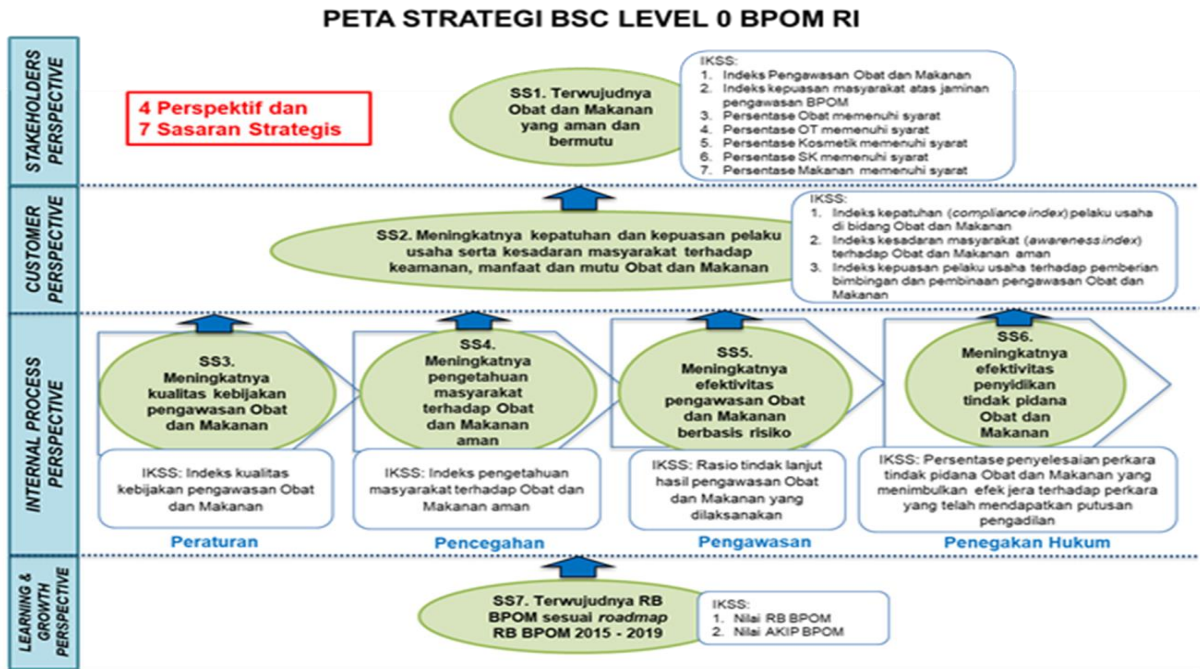
"Terwujudnya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efisien"

Indikator Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

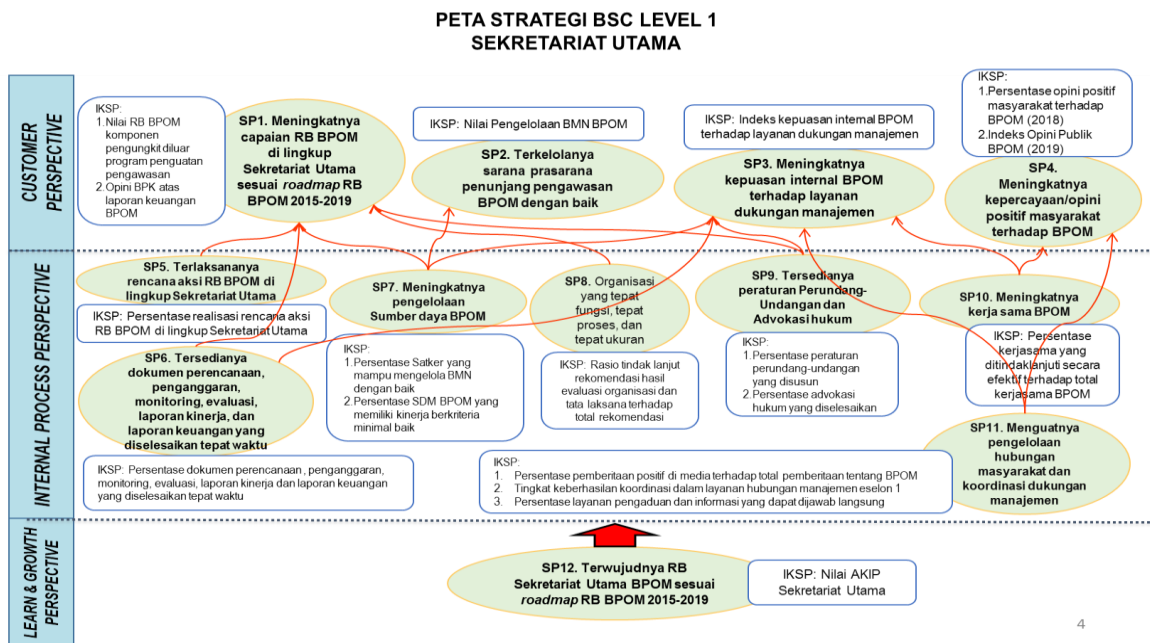
1. Meningkatnya capaian Reformasi Birokrasi BPOM di Bidang Akuntabilitas
2. Meningkatnya nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM

A.4 Sasaran Kegiatan

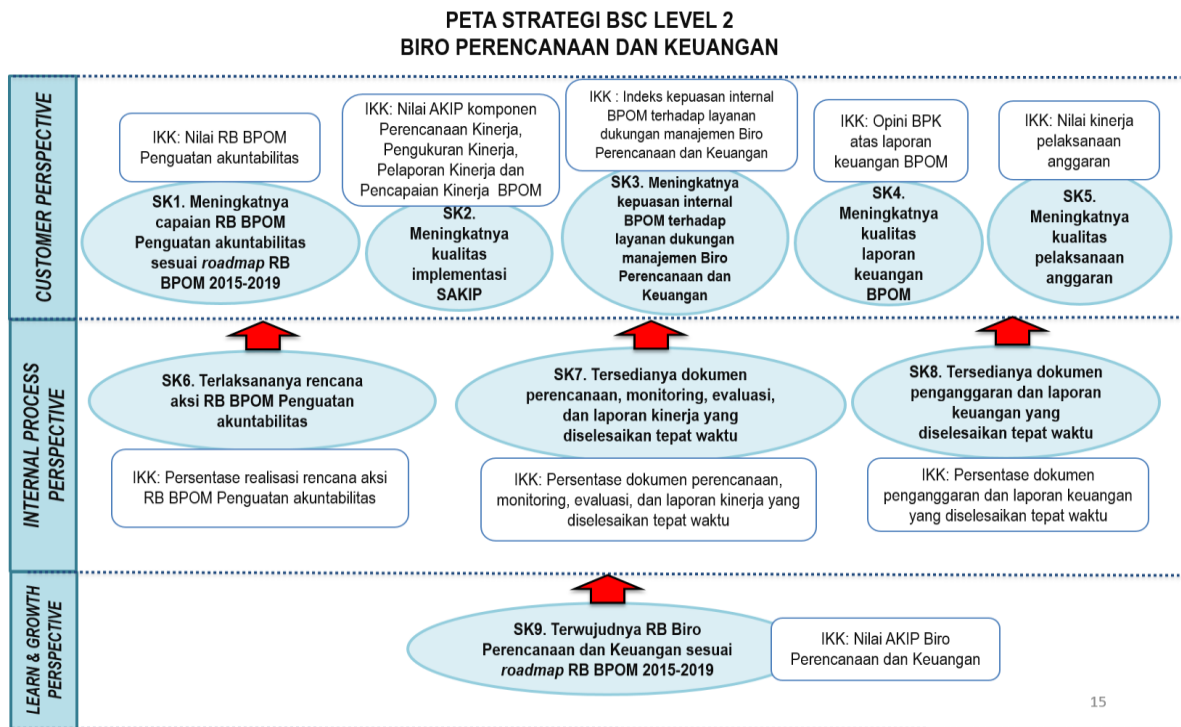
Sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan lingkungan strategis dan sumber daya yang dimiliki Biro Perencanaan dan Keuangan. Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai 9 sasaran kegiatan dan 9 indikator yang disusun berdasarkan pendekatan *Balance Scorecard*. Dalam kurun waktu dua tahun kedepan (2018-2019) diharapkan Biro Perencanaan dan Keuangan dapat mencapai sasaran strategis level 2 yang diturunkan dari sasaran strategis level 0 BPOM dan level 1 Sekretaris Utama sebagai berikut:



Gambar 2
Peta Strategi BSC Level 0 BPOM



Gambar 3
Peta Strategi BSC Level 1 Sekretaris Utama



Gambar 4
Peta Strategi BSC Level 2 Biro Perencanaan dan Keuangan

Dari peta strategi Biro Perencanaan dan Keuangan diatas, terdapat 9 (Sembilan) Sasaran Kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dalam mendukung RB BPOM, Biro Perencanaan

dan Keuangan memiliki peran dan tanggungjawab pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, **indikatornya** adalah **Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas** dengan target 4,62 pada tahun 2018 dan target nilai 5 pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2019

2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan terbaru Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal Kinerja dan (5) Pencapaian Kinerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya** adalah **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM dengan target 70 pada tahun 2018** dan target 72,4 pada akhir tahun 2019.

3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam sebuah organisasi, kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting tidak hanya untuk pelanggan eksternal tetapi juga untuk pelanggan internal. Pelayanan terhadap pelanggan internal menjadi sangat penting karena menentukan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan secara

keseluruhan. Kualitas pelayanan internal akan menjadi salah satu dasar dalam pencapaian tujuan organisasi. Jika pelayanan terhadap pelanggan internal terhambat maka akan menghambat kinerja organisasi, demikian pula sebaliknya. Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon II dan UPT BPOM) di luar Biro Perencanaan dan Keuangan terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Rorenkeu.

Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan pengelolaan keuangan, berupaya memberikan layanan dukungan manajemen seoptimal mungkin untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan internalnya untuk mampu berkinerja sebaik mungkin.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan dengan target 60 pada tahun 2018 dan target 61 pada akhir tahun 2019.**

4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM.

Laporan keuangan memiliki peranan sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 bahwa laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Mulai tahun 2015 pemerintah menerapkan pelaporan keuangan dengan sistem akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2004 tentang PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA: Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

- (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
- (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- (4) efektivitas sistem pengendalian intern.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Opini BPK atas laporan keuangan BPOM dengan perolehan opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM pada tahun 2018** dan akhir tahun 2019.

5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: (1) Revisi DIPA, (2) Deviasi Halaman III DIPA, (3) Pengelolaan UP, (4) Rekon LPJ Bendahara, (5) Data Kontrak, (6) Penyelesaian Tagihan, (7) Penyerapan Anggaran, (8) Retur SP2D, (9) Perencanaan Kas (Renkas), (10) Pengembalian/Kesalahan SPM, (11) Dispensasi Penyampaian SPM, (12) Pagu Minus

Metode penilaian kinerja pelaksanaan anggaran mengacu pada Lampiran Surat Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-4547/PB.2/2018 Tanggal 30 Mei 2018 Tentang Integrasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Online Monitoring (OM) SPAN dan Penggunaan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Nilai kinerja pelaksanaan anggaran, dengan target 75 pada tahun 2018** dan 85,25 pada akhir tahun 2019.

6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas.

Untuk mampu mencapai pemenuhan RB BPOM Penguatan Akuntabilitas diperlukan kepastian terhadap dilaksanakannya setiap rencana aksi RB yang telah ditetapkan dalam roadmap RB 2015-2019. Untuk itu, realisasi rencana aksi RB Penguatan Akuntabilitas tersebut menjadi hal yang wajib dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang

baik. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas, dengan target 100% pada tahun 2018 dan akhir 2019.**

7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu.

Kualitas RB dan SAKIP lembaga sangat erat kaitannya dengan siklus manajemen kinerja yaitu perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi serta pelaporan kinerja dan keuangan. Untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan BPOM, diperlukan perencanaan kinerja yang berkualitas disertai dengan penganggaran yang proporsional sehingga mampu menghasilkan program dan kegiatan yang berkualitas pula. Disamping itu, untuk peningkatan berkelanjutan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala termasuk pelaporannya sebagai wadah perbaikan dan peningkatan kinerja pada perencanaan periode selanjutnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2018 dan tahun 2019.**

8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.

Penganggaran dan laporan keuangan sebagai salah satu penentu kualitas RB dan SAKIP lembaga. BPOM sebagai K/L diwajibkan mencari dan melaporkan setiap penggunaan keuangan Negara serta kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sangat berpengaruh terhadap nilai SAKIP BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100 % pada akhir 2019.**

9. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019.

Biro Perencanaan dan Keuangan selain mempunyai tugas terhadap pencapaian RB BPOM dan Sekretariat Utama, juga memiliki tanggungjawab terhadap pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM, dalam hal ini adalah terkait pemenuhan akuntabilitas kinerja tingkat entitas Satuan Kerja/Unit Organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemenuhan RB Biro Perencanaan dan Keuangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan manajemen kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka **indikatornya adalah Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan target 78 pada tahun 2018 dan 81 pada akhir 2019.**

Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Program di Biro Perencanaan dan Keuangan setelah revisi Rencana Strategis Perubahan OTK.



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.	1. Nilai RB BPOM Penataan akuntabilitas
2. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP.	2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM.
3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	3. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM.	4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran.	5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
6. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas
7. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu
8. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	8. Laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
9. Terwujud -nya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Program :
Dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya BPOM

Gambar 5
Visi, Misi, dan Tujuan Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan perubahan OTK BPOM dan Penyusunan Peta Strategi berdasarkan *perspective balance scorecard* berikut sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam revisi Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019.

Tabel 4
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2018 (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP A	2	6	12	
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75				3

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
	2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	40	40	41	
	3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	56	
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan dan monitoring evaluasi yang dihasilkan	15	15	15	
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana dan RB	Jumlah kajian Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	1	1	

Tabel 5
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	5
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	72,4
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	61
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	85,25
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100 %	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100%
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	81

Kesembilan indikator dari Sasaran Kegiatan pada Revisi Rencana Strategis 2015-2019 perubahan OTK BPOM dijadikan sebagai IKU Biro Perencanaan dan Keuangan.

Indikator Kinerja Utama

Biro Perencanaan dan Keuangan

1. Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas
2. Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM
3. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan
4. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
5. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
6. Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas
7. Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu
8. Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu
9. Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Gambar 6
Indikator Kinerja Utama

B. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian kinerja merupakan komitmen kepala unit kerja sebagai penerima amanah kepada atasannya dan kesepakatan antara penerima dengan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja dibuat berdasarkan Rencana Strategis, oleh karena itu Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran, indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam satu tahun melalui kegiatan dan anggaran yang disetujui pada tahun berjalan. Setelah DIPA Biro Perencanaan dan Keuangan disahkan, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada tanggal 5 Januari 2018.

Pada Tahun 2018 terdapat perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan sehingga perlu perubahan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2018 terdiri dari Perjanjian Kinerja OTK lama, Perjanjian Kinerja OTK Baru Maret s.d. Juli 2018 sesuai RENJA OTK Baru, Perjanjian Kinerja OTK Baru Agustus s.d. Desember 2018 setelah DIPA Perubahan OTK baru disahkan pada tanggal 20 Juli 2018, sehingga Dalam Laporan Kinerja tahun 2018 ini, yang dijelaskan adalah IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja OTK Baru.

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan (OTK Lama)

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2018
1	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75	3 unit kerja
		2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	41 satker
		3. Jumlah unit kerja yang menerapkan system manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	56 unit kerja
2	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran,	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, keuangan, dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan.	15 dokumen

	laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi		
3	Tersusunnya kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Kajian Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1 kajian

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OTK Lama periode Januari s.d Februari 2018 ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Pengembangan Organisasi, Penyusunan Program dan Anggaran, Keuangan serta Evaluasi dan Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp 41.149.838.000,-. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 7
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018 OTK BARU
Periode : Maret – Juli 2018

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2018
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Renja 2018 OTK Baru			
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja	70
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Peta Strategi Revisi Rencana Strategis 2015-2019			
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,	70

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2018
		Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	100
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan keuangan	78

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OTK Baru periode Maret s.d. Juli 2018 sesuai RENJA OTK Baru ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja Pelaporan dengan anggaran sebesar 37.148.500.000,00. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018 OTK BARU
Periode : Agustus – Desember 2018

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2018
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Renja 2018 OTK Baru			
1	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja	70
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan Peta Strategi Revisi Rencana Strategis 2015-2019			
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	100
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuanga	78

Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan OTK Baru Periode Agustus s.d. Desember 2018 berdasarkan DIPA OTK Baru mengelola kegiatan Koordinasi Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja Pelaporan dengan anggaran sebesar Rp 38.478.810.000,00,-. Kegiatan ini dijabarkan kedalam sub kegiatan yang dilaksanakan oleh keempat bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan.

C. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator sasaran strategis, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Sekretariat Utama, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{(\text{bobot} \times \% \text{capaian})_1 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_2 + (\text{bobot} \times \% \text{capaian})_n\} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, sebagai berikut :

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100% < \chi \leq 125%$
Baik	100%
Cukup	$75% \leq \chi < 100%$
Kurang	$\chi < 75%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125%$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Sasaran Kegiatan yang masing-masing sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan 1 indikator kinerja, sehingga jumlah seluruhnya ada 9 Indikator kinerja.

Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2018 seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9
Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Kriteria
<i>Stakeholder Perspective</i>					
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	4,64	99,57%	Cukup
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	66,85**	95,50%	Cukup
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	79	131,67%	Tidak dapat di simpulkan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Kriteria
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP**	100%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	94,63	126,17%	Tidak dapat disimpulkan
<i>Internal Perspective</i>					
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	95,31%	95,31	Cukup
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	Baik
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	73,38	94,08%	Cukup

**= nilai AKIP BPOM/opini BPK atas laporan keuangan BPOM yang diterima tahun 2018 untuk penilaian kinerja tahun 2017

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2018 kategori capaian Sasaran Kegiatan dengan kategori Baik ada 3 (tiga), Cukup 4 (empat) dan 2 (dua) Tidak dapat disimpulkan.

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis masing-masing Sasaran Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

2.1 Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019.

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan Indikator Kinerja **Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas** (indikator baru).

Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas dihitung berdasarkan penilaian dari Kemenpan dan RB dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Menpan RB

Tabel 7
Target dan Realisasi Sasaran ke 1 :
Meningkatnya Capaian RB BPOM Penguatan Akuntabilitas sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,61	4,62	4,64	99,57%	100%	5	92,2%

Dari tabel tersebut di atas, realisasi tahun 2018 menggunakan nilai sementara hasil audit Kementerian PANRB yang disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2018, mengingat hingga laporan ini disusun belum diterima hasil audit RB secara resmi. Apabila realisasi dibandingkan dengan target 2018 menunjukkan kriteria Cukup yang mendekati ke arah Baik (99,57%). Bila dibandingkan dengan target

tahun 2017 capaiannya 100%, namun bila dibandingkan dengan target 2019 capaiannya 92,2%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sesuai dengan rekomendasi (tahun 2017) dan hasil evaluasi sementara (tahun 2018) hasil audit RB oleh Kementerian PANRB adalah :

- 1) Bimbingan teknis perencanaan strategis bagi seluruh unit pusat dan BB/BPOM, agar dapat melakukan penyusunan Rencana Strategis sesuai OTK baru.
- 2) Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan, untuk membahas perencanaan program/kegiatan tahun 2019.
- 3) Bimtek SAKIP dan Monev Online, untuk meningkatkan kemampuan staf pengelola data menginput aplikasi monev online (*e-performance*, e-monev dari Bappenas, SMART dari Kementerian Keuangan dan TEPPA dari LKPP) dan menyusun Laporan kinerja unitnya.
- 4) Mengembangkan Manajemen Kinerja BPOM, dengan melakukan pembahasan cascading indikator dari level 2, ke level 3 hingga level 4.
- 5) Memantau pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PAN dan RB.

Agar pada tahun 2019 target tercapai, maka semua unit kerja harus segera memantapkan pemilihan indikator kinerja, target dan definisi operasionalnya. Selain itu, pemanfaatan *e-peformance* segera dilaksanakan dengan optimal.

Indikator Kinerja **Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas** harus terus dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai RB BPOM, sehingga dapat menunjukkan BPOM dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian PAN RB dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

2.2 Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja** (indikator baru) terealisasi 95,50% dengan kategori Cukup.

Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap K/L.

Cara menghitung dilakukan oleh Kementerian PAN RB berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dengan menjumlahkan 4 (empat) komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Tabel 8
Target dan Realisasi Sasaran ke 2:
Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	65,95	70	66,85	95,50%	101,36%	74,4	89,85%

Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian AKIP BPOM Tahun 2017 (untuk kinerja tahun 2016) oleh Kementerian PAN RB (nilai total **komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja** dengan nilai 66,95 capaian indikator adalah 101,36%. Apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis tahun 2019 dengan target 74,4, maka capaian indikator adalah 89,85%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

- 1) Penyusunan perencanaan kinerja BPOM berbasis *Balance Scorecard* (BSC), penyusunan peta strategi (berbasis *Balanced Scorecard*) dan indikator kinerja (termasuk definisi operasionalnya) sesuai OTK baru, yang di *cascade* dari level 0 ke level 1, dan ke level 2 (pusat dan BB/BPOM). Selanjutnya disusun Perjanjian Kinerja di level 0 dan kepala unit eselon 1, kepala unit eselon 2 (pusat dan BB/BPOM) sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Penyusunan Sistem perencanaan berbasis elektronik *e-planning*. *E-planning* BPOM merupakan aplikasi penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis *workplan*. *E-planning* memastikan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara program, kegiatan, dan output. Dengan demikian, rancangan program, kegiatan, dan alokasi anggaran lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- 3) Mendorong unit kerja untuk menginput data capaian kinerja ke dalam aplikasi *e-performance* yang terintegrasi dengan e-SKP dan anggaran. Selain itu juga mendorong unit kerja untuk menginput data ke aplikasi lain seperti e-monev dari Bappenas, SMART dari Kementerian Keuangan dan TEPRRA dari LKPP.
- 4) Memantau capaian kinerja, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut sesuai indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dilakukan dengan pembahasan dengan seluruh unit kerja eselon 2 di pusat (setiap 3 bulan). Selain itu dilakukan monitoring dan pelaksanaan evaluasi kinerja sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan reformasi birokrasi ke 20 BB/BPOM.
- 5) Bersama Inspektorat Utama melakukan *benchmarking* ke Kementerian PUPR untuk memperoleh informasi pengalamannya dalam penyusunan laporan kinerja dengan OTK baru. Kementerian PUPR termasuk kementerian yang baru melakukan restrukturisasi organisasi.
- 6) Penyusunan Laporan Kinerja BPOM tahun 2018
Agar capaian kinerja tahun 2019 tercapai, maka semua unit kerja harus segera memantapkan pemilihan indikator kinerja, target dan definisi operasionalnya. Hal ini akan berdampak pada pemanfaatan e-

performance dapat segera dilaksanakan dengan optimal. Kepatuhan melaporkan dan penyampaian laporan unit kerja tidak tepat waktu juga menjadi kendala. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja unit.

Indikator **Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja** perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menunjang peningkatan nilai RB BPOM (sama halnya dengan sasaran kegiatan no 1). Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan koordinasi terus menerus dengan Kementerian PANRB dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya serta meningkatkan kemampuan staf pengelola data dalam melaporkan kinerja unitnya.

2.3 Meningkatnya Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** (indikator baru).

Survei dilakukan untuk mengetahui seberapa baik pelayanan yang telah diberikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan kepada unit kerja di lingkungan BPOM. Layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan meliputi Layanan Revisi DIPA/POK, Layanan Pencairan Anggaran serta Layanan Konsultasi terkait Perencanaan Kinerja, Penganggaran, Pencairan Anggaran, Penyusunan laporan keuangan serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Survei berisi pertanyaan tentang layanan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan, serta sikap pegawai saat melayani. Penilaian dalam 5 skala yaitu nilai 1: Tidak Baik, nilai 2: Kurang Baik, nilai 3 : Cukup, nilai 4: Baik dan nilai 5 : Sangat Baik. Responden berasal dari unit kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM (284 responden) dengan nilai rata-rata 79.

Tabel 9
Target dan Realisasi Sasaran ke 3 :
Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen
Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	—	60	79	131,67%	—	61	129,51%

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa tahun 2018 realisasi melebihi target yang ditentukan sehingga masuk kategori Tidak dapat disimpulkan (131,67%).

Biro Perencanaan dan Keuangan belum pernah melakukan pengukuran kepuasan internal layanan dukungan manajemen di lingkungan BPOM. Saat ini Biro Perencanaan dan Keuangan belum dapat membandingkan indeks kepuasan internal yang telah dilakukan oleh unit pendukung lingkungan Sekretariat Utama karena cara perhitungannya berbeda.

Selain itu perlu di kaji penetapan jumlah dan sasaran responden serta menggunakan cara analisis yang baik dalam survei yang dilakukan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah :

- 1) Melakukan perkuatan koordinasi di Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan melalui rapat koordinasi internal, komunikasi melalui telepon, e-mail, *whatsapp group*.
- 2) Menerima konsultasi masalah yang dihadapi unit kerja Pusat dan BB/BPOM terkait masalah penganggaran, perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan. Konsultasi dapat melalui tatap muka, komunikasi melalui telpon, *whatsapp* maupun email.

Agar realisasi indikator kinerja ini mencapai kategori Baik atau Memuaskan, maka akan dilakukan kajian penetapan target, realisasi tahun 2018 dijadikan sebagai baseline data. Meningkatkan layanan bimbingan teknis, pendampingan dan layanan konsultasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Indikator Kinerja **Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** harus tetap dipertahankan untuk menjadikan Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja yang mampu melayani sesuai dengan kebutuhan dan harapan unit kerja di lingkungan BPOM.

2.4 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan BPOM

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM** (indikator baru).

Tabel 10
Target dan Realisasi Sasaran ke 4 :
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	100%	100%	WTP	100%

Indikator ini dihitung berdasarkan opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya (n-1) yang diserahkan pada tahun berjalan (n)

Berdasarkan Opini BPK yang diterima tahun 2018 untuk Laporan Keuangan BPOM tahun 2017 dengan hasil WTP, terealisasi 100% dengan kategori Baik.

Opini ini dicapai karena Laporan Keuangan BPOM Tahun 2017 telah disajikan secara wajar berdasarkan kriteria :

- 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 2) Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*)
- 3) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
- 4) Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Apabila dibandingkan dengan Opini BPK pada tahun 2017 atas Laporan Keuangan BPOM tahun 2016 yaitu WTP, maka nilai capaiannya adalah 100%. Demikian halnya apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis tahun 2019 dengan target WTP, maka nilai capaian indikator ini adalah 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempertahankan pencapaian target adalah :

- 1) Pelaksanaan Bimtek Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (pusat dan BB/BPOM).
- 2) Review kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
- 3) Pelatihan Laporan Keuangan.
- 4) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.
- 5) Penyusunan Revisi Pedoman Penatausahaan PNB
- 6) Rekonsiliasi dan Konsolidasi PNB

Untuk mempertahankan Opini WTP dari BPK, maka BPOM melakukan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan BPOM sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, berkaitan dengan sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan yaitu PNB fungsional, Penerimaan PNB Lainnya, Potongan Tunjangan Kinerja dalam Belanja Pegawai, Kesalahan Penganggaran, Pengelolaan Persediaan, Pengelolaan Aset Tetap, Pelaksanaan Belanja Barang dan Pelaksanaan Belanja Modal.

Indikator **Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM** tetap dipertahankan. Dengan mendapat opini WTP dari BPK, dapat meningkatkan citra BPOM sebagai institusi yang pertanggungjawaban keuangannya wajar dan akuntabel. Upaya kerjasama dengan BPK dan instansi terkait lainnya perlu terus ditingkatkan.

2.5 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran** (indikator baru).

Tabel 11
Target dan Realisasi Sasaran ke 5 :
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	—	75	94,63%	126,67%	—	85,25	105,51%

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 12 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

12 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM
- 12) Pagu Minus

Pengukuran atas indikator ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Setiap Kementerian/Lembaga dan satker dapat memantau nilai IKPA secara periodik melalui aplikasi OMSPAN secara *online*.

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa realisasi indikator Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran tahun 2018 tidak dapat disimpulkan dengan nilai capaian 126,17%.

Secara nasional, kecuali indikator realisasi (penyerapan anggaran) dan Deviasi halaman 3 DIPA memiliki nilai di atas rata-rata nasional.

Untuk mempertahankan capaian ini, akan dilakukan monitoring evaluasi terhadap 12 indikator yang menjadi komponen penilaian.

Dari 12 indikator kinerja pelaksanaan anggaran tersebut, terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan kinerjanya yaitu:

- 1) Pengelolaan UP
- 2) Data kontrak
- 3) Kesalahan SPM
- 4) Halaman III DIPA
- 5) Penyelesaian tagihan
- 6) Perencanaan Kas
- 7) Realisasi Anggaran

Apabila dibandingkan dengan hasil penilaian Kementerian Keuangan tahun 2017 tentang Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan nilai 94,65, maka capaiannya adalah 99,99%. Apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis tahun 2019 dengan target 85,25, realisasinya adalah 111,00%. Hal ini menunjukkan, realisasi tahun 2018 telah melampaui target Rencana Strategis.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:

- 1) Workshop penganggaran kegiatan terpadu pusat dan UPT Balai
- 2) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran TA 2018 dan Petunjuk Teknis Kegiatan Anggaran TA 2018.

- 3) Pemantapan mekanisme perencanaan dan penganggaran
- 4) Supervisi penganggaran bersama instansi terkait seperti dengan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS
- 5) Koordinasi, evaluasi dan verifikasi tagihan belanja BPOM.
- 6) Pembinaan perbendaharaan Balai Besar/Balai POM.
- 7) FGD perbendaharaan.
- 8) Koordinasi pelaksanaan anggaran.
- 9) Penyusunan Pedoman Pembinaan Perbendaharaan.
- 10) Evaluasi pelaksanaan anggaran.
- 11) Penyusunan Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan Biro Perencanaan dan Keuangan antara lain penyusunan *plan of action* kegiatan dan dipantau secara berkala sehingga dapat mengoptimalkan realisasi anggaran, melakukan revisi Halaman III DIPA bersamaan dengan pelaksanaan revisi DIPA untuk mengurangi *gap* antara rencana penarikan dana (RPD) dan realisasi. Walaupun secara nasional nilai indikator Revisi DIPA telah optimal, namun di beberapa Satker masih terdapat revisi DIPA lebih dari 10 kali per tahun. Ke depan, frekuensi revisi anggaran (DIPA/POK) akan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja Kepala Balai Besar/Balai POM. Diharapkan hal ini akan mengurangi frekuensi revisi anggaran di Balai Besar/Balai POM, karena semakin besar jumlah revisi, menunjukkan perencanaan anggaran yang tidak tepat

2.6 Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Persentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas** (indikator baru).

Rencana aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas merupakan rencana aksi program penguatan akuntabilitas yang terdapat pada roadmap RB 2015-2019 berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2015-2019.

Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas = (Jumlah rencana aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas yang

terlaksana/Jumlah rencana aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas pada tahun berjalan) x 100%.

Tabel 12
Target dan Realisasi Sasaran ke 6 :
Peresentase Realisasi Rencana Aksi RB BPOM Penguatan Akuntabilitas

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 6: Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	—	100%	95,31%	95,31%	—	100%	95,31%

Dari tabel tersebut di atas, pada tahun 2018 indikator ini terealisasi 95,31% dengan kategori Cukup. Realisasi belum mencapai target karena masih terdapat beberapa kegiatan yang belum selesai di tahun 2018 diantaranya:

- a. Target dan metode pengukuran untuk indikator level 1 s.d. 4 masih belum final, sehingga pemanfaatan *e-performance* BPOM belum optimal.
- b. Evaluasi akuntabilitas kinerja unit kerja BPOM belum optimal, saat ini sedang dilakukan revisi Pedoman Evaluasi.

Kedua kegiatan ini ditargetkan selesai pada Triwulan II tahun 2019.

Mengingat indikator ini baru, maka tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis tahun 2019 dengan target 100%, maka realisasinya adalah 95,31%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:

Mengembangkan manajemen kinerja, dengan mengembangkan *e-performance* sesuai dengan OTK baru yang diintegrasikan dengan e-SKP dan anggaran, sehingga tergambar anggaran berbasis kinerja, (dengan menggunakan jasa konsultan).

2.7 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu** (indikator baru).

Dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja meliputi:

- 1) Rencana Strategis BPOM/ Review Rencana Strategis/ Kajian Lingkungan Strategis
- 2) Rencana Strategis /Revisi Rencana Strategis/Review Rencana Strategis Sekretariat Utama
- 3) Renja BPOM tahun n+1
- 4) Rencana Kinerja Tahunan BPOM tahun n
- 5) Rencana Kinerja Tahunan Sekretaris Utama tahun n
- 6) Perjanjian Kinerja BPOM tahun n
- 7) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1
- 8) Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama tahun n.
- 9) Laporan Kinerja Sekretariat Utama n-1
- 10) Laporan Tahunan BPOM

Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan oleh batas waktu yang ditetapkan oleh suprasistem terkait. Pada tahun 2018, capaian indikator ini 100% dengan kategori Baik.

Cara menghitung Persentase dokumen monitoring, evaluasi dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kinerja diselesaikan atau dihasilkan dikalikan 100%

Tabel 13
Target dan Realisasi Sasaran ke 7 :
Persentase Dokumen Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Kinerja Yang
Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	—	100%	100%	100%	—	100%	100%

Pada akhir tahun 2018 Biro Perencanaan dan Keuangan telah menyusun Rencana Strategis BPOM dan Rencana Strategis Sekretariat Utama sesuai dengan OTK Baru, namun masih menunggu pengesahan.

Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi 2017. Namun apabila dibandingkan dengan target akhir periode Rencana Strategis tahun 2019 adalah 100%, maka hal ini menunjukkan sasaran kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- 1) Penyusunan Revisi Rencana Strategis BPOM 2015-2019.
- 2) Penyusunan rancangan teknokratik Rencana Strategis 2020-2024.
- 3) Pertemuan penyusunan perencanaan tahunan.
- 4) Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama, dan Laporan Kinerja BPOM.
- 5) Melakukan pendampingan/ asistensi ke unit kerja dalam menyusun dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi serta dokumen laporan kinerja.

- 6) Meningkatkan kompetensi petugas pengelola data dalam melakukan *entry data* pada aplikasi *money online* serta melakukan laporan kinerja melalui Sosialisasi Bimtek SAKIP dan *Money Online*.

Agar kategori capaian indikator tetap Baik, maka perlu dilakukan evaluasi untuk perbaikan yang berkesinambungan disamping itu perlu dilakukan pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi (*e-planning*), penyusunan Rencana Strategi 2020-2024, mengembangkan aplikasi *e-performance* yang terintegrasi.

Indikator **Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu** tetap dipertahankan, yang dapat menunjukkan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah unit kerja yang profesional dan berkinerja tinggi.

2.8 Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan indikator **Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu** (indikator baru).

Dokumen penganggaran dan laporan keuangan meliputi:

- 1) DIPA BPOM tahun n+1/ POK tahun n+1
- 2) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1
- 3) Laporan Keuangan BPOM Semester tahun n
- 4) Laporan Keuangan Sekretariat Utama tahun n-1
- 5) Laporan Keuangan Sekretariat Utama Semester Tahun n

Ketepatan waktu diukur berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.

Cara menghitung Persentase penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu adalah Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen Jumlah dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan/dihasilkan tepat waktu dikalikan 100%

Tabel 14
Target dan Realisasi Sasaran ke 8 :
Persentase Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 8: Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	—	100%	100%	100%	—	100%	100%

Realisasi indikator kinerja **Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2018 adalah 100% dengan capaian 100%.

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun 2017. Namun dalam pelaksanaannya, pelaporan dokumen penganggaran dan laporan keuangan tahun 2017 disampaikan tepat waktu sesuai dengan pedoman terkait. Dibandingkan target 100% pada Rencana Strategis 2018 maka capaiannya adalah 100%. Hal ini menunjukkan capaian tahun 2018 telah mencapai target.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

- 1) Sosialisasi dan Bimtek penyusunan RKAKL pagu anggaran
- 2) Sosialisasi dan Bimtek RKAKL alokasi anggaran.
- 3) Pertemuan penyusunan RKAKL revisi TA 2018 OTK baru BPOM.
- 4) Diseminasi kebijakan baru perencanaan dan penganggaran pusat dan UPT Balai
- 5) Penyusunan standar biaya keluaran (SBK) dengan stakeholder.
- 6) Koordinasi penganggaran dengan lintas sektor.
- 7) Pertemuan rekonsiliasi hibah/penganggaran dengan stakeholder.

- 8) Monitoring kegiatan PNBP di Balai POM dalam rangka penyusunan program PNBP 2019.
- 9) Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran.
- 10) Melaksanakan FGD dalam rangka Penyusunan Laporan keuangan BPOM.
- 11) Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan tingkat Satker Sekretariat Utama dan BPOM.

Untuk mempertahankan capaian indikator agar tetap memperoleh kategori Baik, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Mengembangkan aplikasi *e-budgeting*
- 2) Penyusunan Standar Biaya Keluaran untuk output baru karena adanya penyesuaian OTK Baru

2.9 Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019

Sasaran Kegiatan ini di ukur menggunakan indikator **Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan** (indikator baru).

Indikator ini merupakan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama/APIP BPOM atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Organisasi dalam hal ini Biro Perencanaan dan Keuangan.

Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari:

1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100
2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90
3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80
4. B (baik), dengan skor > 60 - 70
5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60
6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50
7. D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30

Tabel 15
Target dan Realisasi Sasaran ke 9 :
Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan

Sasaran Kegiatan	Indikator	Realisasi 2017	2018			Realisasi 2018 thd 2017 (%)	Target 2019	Relisasi 2018 thd 2019 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)
Sasaran Kegiatan 9: Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	72,17	78	73,38	94,08%	101,68%	81	90,59%

Berdasarkan penilaian AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan yang diterima tahun 2018 untuk kinerja tahun 2017 dengan nilai 73,38 dengan capaian 94,08% dengan kategori Cukup.

Dari 5 komponen yang dinilai (dibandingkan nilai tahun 2017) yang mengalami peningkatan nilai adalah komponen Perencanaan kinerja dan Pengukuran kinerja, nilai tetap adalah Evaluasi internal dan yang mengalami penurunan nilai adalah komponen Pelaporan kinerja dan Pencapaian kinerja. Untuk itu perlu perhatian terhadap komponen yang nilainya turun maupun yang tetap. Hal ini akan dilakukan perbaikan dalam menyusun Pelaporan Kinerja dan meningkatkan Capaian Kinerja.

Apabila nilai AKIP yang diterima tahun 2018 untuk kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan penilaian tahun 2017 untuk kinerja tahun 2016 adalah 72,17, maka capaiannya adalah 101,68%

Apabila dibandingkan dengan Rencana Strategis tahun 2019 dengan target 81, maka capaiannya adalah 90,59%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target adalah:

- 1) Penyusunan Review Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai OTK Baru

- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Penyusunan Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 4) Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka meningkatkan AKIP
- 5) Evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan
- 6) Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan sesuai yang tercantum dalam rencana aksi perjanjian kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Capaian Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan:

- 1) Meningkatkan komponen pencapaian sasaran dan kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan.
- 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mencari solusinya.
- 3) Membangun komunikasi internal yang efektif dan efisien.

A. PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TERHADAP TARGET 2019

Capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 terhadap Target Rencana Strategis 2019

Sasaran	Indikator	Target Rencana Strategis 2019	2015		2016		2017		2018	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
OTK Lama										
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u>	1. Jumlah unit kerja yang	54	0	0%	0	0%	0	0%	—	—

LAPORAN KINERJA 2018

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sasaran	Indikator	Target Rencana Strategis 2019	2015		2016		2017		2018	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkat-nya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	memperoleh nilai SAKIP A									
	Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai SAKIP minimal 75 *	3	—	—	—	—	—	—	—	—
	2. Jumlah Satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi SAKIP A	41	40	100%	40	%	41	100%	—	—
	3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	55	55	100%	55	100%	56	101,82 %	—	—
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan hasil evaluasi yang terintegrasi	4. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan monitoring dan evaluasi yang dihasilkan.	15	15	100%	15	100%	15	100%	—	—
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Tersusunnya kajian organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi.	5. Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1	1	100%	1	100%	1	100%	—	—

LAPORAN KINERJA 2018

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sasaran	Indikator	Target Rencana Strategis 2019	2015		2016		2017		2018	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
OTK Baru										
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	5	—	—	—	—	—	—	4,61	92,20 %
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74,7	—	—	—	—	—	—	66,85	89,85 %
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	61	—	—	—	—	—	—	79	129,5 1%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	—	—	—	—	—	—	WTP	100%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	85,25	—	—	—	—	—	—	94,63	111,00 %
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u>	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM	100 %	—	—	—	—	—	—	94,3 1	95,31 %

Sasaran	Indikator	Target Rencana Strategis 2019	2015		2016		2017		2018	
			Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019	Realisasi	% Realisasi thdp target 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Penguatan akuntabilitas									
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	WTP	—	—	—	—	—	—	WTP	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	—	—	—	—	—	—	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	81	73,38	—	—	—	—	—	73,38	90,59%

*= indikator baru hasil review Rencana Strategis Tahun 2017, belum di laksanakan pada Tahun 2018 karena sudah menggunakan indikator sesuai OTK baru.

Dari tabel tersebut di atas terlihat 2 indikator baru yang realisasinya telah mencapai target Rencana Strategis tahun 2018, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk indikator **Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan** serta **Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran**.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2018 sesuai DIPA OTK lama Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai anggaran senilai Rp.41.149.800.000,00. Nilai anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada RENJA BPOM OTK Baru senilai Rp37.148.500.000,00. DIPA Revisi OTK baru yang terbit tanggal 20 Juli 2018 anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan senilai Rp38.478.810.000,00. Terdapat anggaran dari subbag organisasi dan tata laksana yang sudah terealisasi sebelum terbit DIPA OTK baru senilai Rp1.330.310.000,00, kegiatan tersebut masuk ke Sasaran strategis/kegiatan OTK Lama yaitu tersusunnya kajian organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi sebagai berikut :

Tabel 17
Realisasi Anggaran OTK Lama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
<u>Sasaran Kegiatan 1</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75 2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	-	-	-	-	-	-
<u>Sasaran Kegiatan 2</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	-	-	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
dan Reformasi Birokrasi							
<u>Sasaran Kegiatan 3</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1	1	100,00%	1.330.310.000	1.252.971.062	94,19%

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan 80 (delapan puluh) sub kegiatan pada tahun 2018. Berikut adalah realisasi netto tahun 2018 per sasaran strategis dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan :

Tabel 18
Realisasi Anggaran OTK Baru

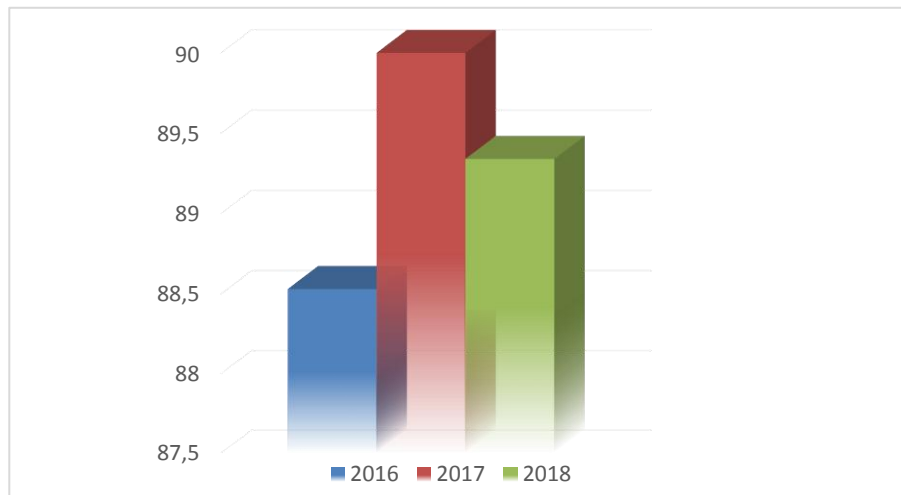
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>							
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,62	4,64	99,57%	5.209.360.000	5.036.506.304	96,68%
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	66,85	95,50%	2.250.472.000	2.049.093.220	91,05%

LAPORAN KINERJA 2018

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	79	131,67%	1.279.872.000	1.041.375.490	81,37%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP	100%	5.499.609.000	5.018.033.507	91,24%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	94,63	126,17%	5.838.447.000	5.321.030.432	91,14%
<i>Internal Perspective</i>							
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	95,31%	95,31	1.575.260.000	1.371.472.158	87,06%
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	5.741.907.000	5.266.085.589	91,71%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	4.226.066.000	3.479.542.438	82,34%
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	73,38	94,08%	5.527.507.000	4.542.844.959	82,19%

Realisasi anggaran netto Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2018 menurut aplikasi Monev DJA adalah Rp34.378.915.119,00 (89,35%). Terjadi penurunan persentase realisasi dari tahun 2017 yaitu 90,00 %, namun masih lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu 88,53%.



Gambar 7
Perbandingan Realisasi Anggaran 2016 s.d. 2018

C. ANALISI EFISIENSI ANGGARAN

Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Meskipun pengukuran tingkat efisiensi kegiatan tidak diminta pada format Laporan Kinerja KemenPAN dan RB, namun Biro Perencanaan dan Keuangan tetap melakukan evaluasi tingkat efisiensi sub kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Rincian penghitungan efisiensi sub kegiatan tahun 2018 disampaikan pada lampiran Laporan Kinerja ini. Berikut informasi tingkat Efisiensi sub kegiatan :

Kategori Efisiensi	Jumlah sub Kegiatan
Ekstrim Efisien ($TE > 0,5$)	4
Efisien	76
Tidak Efisien	0

- a. Dari 80 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, terhitung 76 sub kegiatan yang terhitung efisien.
- b. Terdapat 4 sub kegiatan yang Tingkat Efisiensinya lebih dari 0,5, antara lain :
 - Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (TE = 2,07)
 - Pelatihan Laporan Keuangan (TE = 0,52)
 - Penyusunan Standar Biaya (SBK) Dengan Stakeholder (TE = 0,81)
 - Evaluasi Kesektamaan (TE = 0,99)

Tingginya Tingkat Efisiensi ini disebabkan antara lain karena:

- Juklak dan Juknis Perencanaan masih dalam tahap pembahasan dengan Biro Umum, Finalisasi Juklak belum dilaksanakan karena masukan dari JF Perencana belum lengkap;
- Terdapat Pelatihan Laporan Keuangan yang diikuti tidak menggunakan dana DIPA Sekretariat Utama untuk biaya registrasinya sehingga hanya mencairkan Perjalanan Dinas.
- Pertemuan Kegiatan penyusunan SBK TA 2019 dan Perjalanan Dinas ke Balai dalam rangka penjaringan masukan terkait SBK sudah dilakukan, namun karena adanya perubahan OTK Baru di UPT BPOM, usulan-usulan belum terkumpul sampai dengan akhir tahun 2019 sehingga pencetakan SBK tidak terlaksana.
- Kegiatan Evaluasi Kinerja Sekretariat Utama, tidak semua pegawai ikut serta sehingga biaya perjalanan dinas dan paket meeting tidak seluruhnya terealisasi.

Berikut penghitungan Efisiensi per sasaran strategis/kegiatan yang diperoleh dari rata-rata Tingkat Efisiensi sub kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan:

Tabel 19
Perhitungan Efisiensi per Sasaran Kegiatan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE (Indeks Efisen)	SE (Standar Efisen)	TE (Tingkat Efisen)	KATEGORI
			Input	Output				
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	96,89%	100,00%	1,03	1	0,03	Efisien
2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	94,79%	100,00%	1,06	1	0,06	Efisen
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan	74,61%	96,74%	1,58	1	0,58	Ekstrem Efisien

LAPORAN KINERJA 2018

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE (Indeks Efisen)	SE (Standar Efisen)	TE (Tingkat Efisen)	KATEGO RI
			Input	Output				
	manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan						
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	82,53%	100,00%	1,23	1	0,23	Efisien
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	87,90%	100,00%	1,16	1	0,16	Efisien
6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	87,90%	100,00%	1,16	1	0,16	Efisien
7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	91,27%	100,00%	1,11	1	0,11	Efisien
8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	78,17%	93,53%	1,22	1	0,22	Efisien
9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	87,95%	98,36%	1,15	1	0,15	Efisien
10	Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	94,07%	100,00%	1,13	1	0,07	Efisien

BAB IV PENUTUP

Tahun 2018 merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis lima tahunan 2015-2019, maka pengukuran kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan tahun ini harus mengacu kepada Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan 2015-2019 (dengan OTK baru). Pencapaian kinerja sasaran kegiatan di Biro Perencanaan dan Keuangan dengan:

1. Kriteria BAIK untuk 3 (tiga) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai 100% dari target, yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM. Target WTP berhasil dicapai.
 - b. Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu. Target 100% dokumen diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.
 - c. Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu. Target 100% dokumen yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku atau berdasarkan batas waktu yang diberikan oleh suprasistem terkait.
2. Kriteria CUKUP karena untuk 4 (empat) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai <100% dari target, yaitu :
 - a. Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019 (99,78%).
 - b. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP (95,50%).
 - c. Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas (95,31%).
 - d. Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019 (94,08%).
3. Kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN untuk 2 (dua) sasaran kegiatan karena pencapaian indikator masing-masing mencapai >125% dari target, yaitu :

- a. Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan (131,67%).
- b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran (126,17%).

Ke dua sasaran kegiatan masing-masing dengan indikatornya merupakan sasaran/indikator baru, yang perlu di tinjau kembali penetapan targetnya.

Realisasi anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2018 adalah 89,34%. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 90,00%, namun masih lebih baik dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yaitu 88,53%.

Dari 80 sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, 76 sub kegiatan yang terhitung efisien dan 4 sub kegiatan tingkat efisiensinya $> 0,5$. Ke empat sub kegiatan tersebut adalah:

- a. Pembinaan Jabatan Fungsional (TE = 2,07)
- b. Pelatihan Laporan Keuangan (TE = 0,52)
- c. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) Dengan Stakeholder (TE = 0,81)
- d. Evaluasi Kesektamaan (TE = 0,99)

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka perbaikan kinerja dan antisipasi kemungkinan masalah yang akan dihadapi nantinya adalah:

1. Melakukan monitoring secara berkala atas pencapaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan dalam dalam Perjanjian Kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi yang intensif baik antar Bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan maupun dengan unit lain di internal BPOM.
3. Pengembangan aplikasi *e-Planning*, *e-Budgeting*, *e-Performance* yang terintegrasi.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan suprasistem terkait antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BAPPENAS, Kementerian Bidang PMK, dan sebagainya.
5. Meningkatkan kompetensi pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan melalui berbagai pelatihan atau kursus perencanaan dan manajemen.

LAMPIRAN



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.04.03.213C.08.18.1829 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN NOMOR HK.04.211.05.15.1077 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
TAHUN 2015 - 2019

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penyesuaian indikator kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Biro Perencanaan dan Keuangan, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perubahan Atas Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor HK.04.211.05.15.1077 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2015 – 2019;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt., M. P.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris Utama,

Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.
NIP 19630527 198903 2 001

Pihak Pertama,
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,

Dra. Elin Herlina, Apt., M.P.
NIP 19670418 199203 2 001



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : HK.04.03.213C.08.18.1828 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2018

KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018.
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2018 (OTK BARU)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
<i>Stakeholder Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 1:</u> Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4.62	4,61*	99.78%
<u>Sasaran Kegiatan 2:</u> Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	70	66,85**	95.50%
<u>Sasaran Kegiatan 3:</u> Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	60	79	131.67%
<u>Sasaran Kegiatan 4:</u> Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	WTP**	100%
<u>Sasaran Kegiatan 5:</u> Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	94.63	126.17%
<i>Internal Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 6:</u> Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	100%	95.31%	95.31
<u>Sasaran Kegiatan 7:</u> Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
<u>Sasaran Kegiatan 8:</u> Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
<i>Learning and Growth Perspective</i>				
<u>Sasaran Kegiatan 9:</u> Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan Keuangan	78	73.38	94.08%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Nilai Capaian (%)
<u>Sasaran Kegiatan 1</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1. Jumlah unit kerja yang memperoleh nilai penerapan SAKIP minimal 75 2. Jumlah satker dengan laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 3. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 secara konsisten	-	-	-
<u>Sasaran Kegiatan 2</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Dihasilkannya dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan, dan hasil evaluasi yang terintegrasi	-	-	-
<u>Sasaran Kegiatan 3</u> Tersusunnya Kajian Organisasi dan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi	1	1	100.00%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Periode Agustus - Desember 2018

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI				
			B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
Stakeholder Perspective											
1	SK1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	*	*	*	4.62	-	-	-	4,61(*)
2	SK2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	*	*	*	70	-	-	-	66.85
3	SK3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	*	*	*	60.00	-	-	-	79.00
4	SK4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM		WTP	WTP	WTP		WTP	WTP	WTP
5	SK5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75	75	75	75	78.82	78.93	83.98	94.63
Internal Perspective											
6	SK6	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM Penguatan akuntabilitas	Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM penguatan akuntabilitas	20	40	60	100	10.75	50	75	95.31
7	SK7	Tersedianya dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	60	90	90	100	60	80	80	100
8	SK8	Tersedianya dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase dokumen penganggaran dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	40	40	80	100	40	40	80	100
Learning and Growth Perspective											
9	SK9	Terwujudnya RB Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai <i>Roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Biro Perencanaan dan keuangan	*	*	*	78	-	-	-	73.38

Ket : * Dilakukan di akhir tahun

*) Nilai Sementara

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

Tahun Anggaran : 2018

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRATEGIS	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	881,870,000	820,014,581	92.99	
			<u>Output :</u>						
			Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Perencanaan Strategis yang dihasilkan	dokumen	1	1	100.00		
			RAPAT KERJA NASIONAL	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	800,184,000	797,538,200	99.67	
			<u>Output :</u>						
			Jumlah Dokumen Prosiding Rapat Kerja Nasional yang Dihasilkan	dokumen	1	1	100.00		
			MUSYAWARAH NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	73,803,000	72,843,800	98.70	
			<u>Output :</u>						
			Jumlah Dokumen Prosiding Musyawarah Nasional Pengawasan Obat dan Makanan yang Dihasilkan	dokumen	1	1	100.00		
			BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	<u>Input :</u>					
				Dana	Rp	1,218,837,000	1,218,091,800	99.94	
<u>Output :</u>									
Jumlah Dokumen Bimtek Sakip Dan Monev Online yang Dihasilkan	dokumen	1	1	100.00					
PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA BPOM	<u>Input :</u>								
	Dana	Rp	1,290,020,000	1,242,066,129	96.28				
<u>Output :</u>									
Jumlah Pakrt Pengembangan Manajemen Kinerja BPOM yang Dihasilkan	Paket	1	1	100.00					

PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Rata-Rata % Capaian Target Indikator		IE	SE	KATEGORI	TE	KATEGORI
				Input	Output					
1	Meningkatnya capaian RB BPOM Penguatan akuntabilitas sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas		96.89%	100.00%	1.03	1	Efisien	0.03	Efisien
			BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN STRATEGIS	92.99%	100%	1.08	1	Efisien	0.08	Efisien
			RAPAT KERJA NASIONAL	99.67%	100%	1.00	1	Efisien	0.00	Efisien
			MUSYAWARAH NASIONAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	98.70%	100%	1.01	1	Efisien	0.01	Efisien
			BIMTEK SAKIP DAN MONEV ONLINE	99.94%	100%	1.00	1	Efisien	0.00	Efisien
			PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA BPOM	96.28%	100%	1.04	1	Efisien	0.04	Efisien
			DIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	93.79%	100%	1.07	1	Efisien	0.07	Efisien
			2	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP	Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM		94.79%	100.00%	1.06	1
PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA BPOM BERBASIS BSC	96.59%	100%				1.04	1	Efisien	0.04	Efisien
PENYUSUNAN SISTEM PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK E-PLANNING PENYUSUNAN LAPORAN	94.45%	100%				1.06	1	Efisien	0.06	Efisien
KINERJA BADAN POM TAHUN 2017	99.74%	100%				1.00	1	Efisien	0.00	Efisien
MONITORING DAN SUPERVISI PELAKSANAAN KEGIATAN BALAI BESAR/BALAI POM	94.39%	100%				1.06	1	Efisien	0.06	Efisien
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	84.72%	100%				1.18	1	Efisien	0.18	Efisien
EVALUASI EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BPOM SERTA PERKIRAAN ANGGARAN BPOM 2020- 2045	98.83%	100%				1.01	1	Efisien	0.01	Efisien
3	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan					74.61%	96.74%	1.58	1
			KOORDINASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	84.76%	100%	1.18	1	Efisien	0.18	Efisien
			PEMANTAPAN MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI BB/BPOM	81.16%	87%	1.07	1	Efisien	0.07	Efisien
			PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANAAN)	32.54%	100%	3.07	1	Efisien	2.07	ekstrem Efisien
			KEPERLUAN SEHARI-HARI RORENKEU	99.99%	100%	1.00	1	Efisien	0.00	Efisien
4	Meningkatnya kualitas laporan keuangan BPOM	Opini BPK atas laporan keuangan BPOM		82.53%	100.00%	1.23	1	Efisien	0.23	Efisien
			PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN POM	95.77%	100%	1.04	1	Efisien	0.04	Efisien
			REVIEW KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	72.84%	100%	1.37	1	Efisien	0.37	Efisien
			REVISI PEDOMAN PENGELOLAAN PNPB	88.43%	100%	1.13	1	Efisien	0.13	Efisien
			REKONSILIASI DAN KONSOLIDASI PNPB	93.62%	100%	1.07	1	Efisien	0.07	Efisien
			PENATAUSAHAAN PNPB	87.14%	100%	1.15	1	Efisien	0.15	Efisien
			PELATIHAN LAPORAN KEUANGAN	65.76%	100%	1.52	1	Efisien	0.52	ekstrem Efisien



**Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560**



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI